SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1672

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN

Educational Financing Management in Improving the Quality of Educational Institutions

Riinawati [1*]

*[1]UIN Antasari Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: riinawati@uin-antasari.ac.id

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Ketersediaan dana yang memadai dan pengelolaan yang efektif dapat mendukung terlaksananya berbagai program pendidikan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik manajemen pembiayaan pendidikan serta implikasinya terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik manajemen pembiayaan pendidikan. Data dianalisis melalui teknik analisis isi dengan mengidentifikasi konsep, prinsip, serta strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan yang baik mencakup beberapa tahapan utama yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan penggunaan dana, pengawasan, serta evaluasi penggunaan anggaran. Selain itu, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi menjadi faktor penting dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Manajemen pembiayaan yang efektif juga memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, serta pemerintah. Dengan pengelolaan pembiayaan yang sistematis dan akuntabel, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, memperbaiki sarana prasarana, serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Oleh karena itu, manajemen pembiayaan pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Kata Kunci:
Manajemen Pembiayaan Pendidikan
Mutu Pendidikan
Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Keywords:
Education Financing Management
Education Quality
Education Financial Management

Abstract

Educational financing is one of the crucial elements in ensuring the implementation of quality education. Adequate financial resources and effective financial management can support the implementation of educational programs optimally. This study aimed to analyze the concept and practices of educational financing management and its implications for improving the quality of educational institutions. The research used a qualitative approach with a literature study method by reviewing books and scientific journal articles related to educational financing management. Data were analyzed using content analysis to identify concepts, principles, and effective strategies in managing educational financing. The results showed that effective educational financing management includes several stages, namely budget planning, fund utilization, supervision, and evaluation. In addition, the implementation of transparency, accountability, efficiency, and effectiveness principles plays an essential role in financial management within educational institutions. Effective financing management also requires the involvement of various stakeholders such as school principals, teachers, school committees, and the government. Through systematic and accountable financial management, educational institutions can improve educational services, develop facilities and infrastructure, and enhance teachers' competencies. Therefore, educational financing management plays a strategic role in supporting the continuous improvement of educational quality.

Submit Tgl.: 15-Maret-2026	Diterima Tgl.: 17-Maret-2026	Diterbitkan Tgl.: 18-Maret-2026

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa (Rusmiyati et al., 2024). Untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas, diperlukan dukungan berbagai komponen, salah satunya adalah pembiayaan pendidikan yang memadai. Pembiayaan pendidikan menjadi unsur penting karena hampir seluruh aktivitas pendidikan memerlukan dukungan sumber daya finansial, mulai dari pengadaan sarana prasarana, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, hingga pelaksanaan proses pembelajaran (Prolina & Nugraha, 2023). Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan agar dapat digunakan secara efektif dan efisien (Arwildayanto et al., 2017). Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang baik akan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan karena dana dapat dialokasikan secara tepat sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan (Hidayat & Rusdiana, 2022).

Dalam konteks lembaga pendidikan, pembiayaan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dapat berasal dari masyarakat, orang tua peserta didik, serta berbagai sumber lain yang sah. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan (Zohriah et al., 2023). Namun demikian, berbagai lembaga pendidikan masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya transparansi pengelolaan dana, serta belum optimalnya perencanaan anggaran pendidikan (Komariyah et al., 2022; Sukatin et al., 2023). Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya efektivitas penggunaan dana pendidikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian mengenai manajemen pembiayaan pendidikan menjadi penting untuk dilakukan (Mesiono & Haidir, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, prinsip, dan strategi manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan (Suherman et al., 2025). Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pembiayaan pendidikan telah mengalami perkembangan signifikan sejak era desentralisasi. Melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemerintah berupaya memastikan ketersediaan dana operasional bagi setiap satuan pendidikan. Namun demikian, ketersediaan dana BOS semata belum cukup tanpa didukung oleh kapasitas manajerial yang memadai dalam pengelolaannya (Handayani & Huda, 2020). Desentralisasi pendidikan menuntut sekolah untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya keuangan, sehingga kompetensi kepala sekolah dan tenaga administrasi menjadi faktor kritis dalam keberhasilan manajemen pembiayaan (Wahyudin, 2021).

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kualitas manajemen pembiayaan pendidikan berkorelasi positif dengan peningkatan mutu pendidikan. Lembaga pendidikan yang mengelola pembiayaan secara terstruktur dan transparan terbukti lebih mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan, mengembangkan sarana prasarana, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat (Ginanjar & Purwanto, 2022). Sebaliknya, pengelolaan yang lemah dapat memicu terjadinya penyimpangan penggunaan dana yang merugikan proses pendidikan (Nurhamzah et al., 2020).

Model pembiayaan pendidikan di Indonesia mengenal beragam sumber dana, mulai dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, kontribusi orang tua peserta didik, hingga hasil pengembangan usaha mandiri sekolah. Diversifikasi sumber pembiayaan menjadi strategi penting bagi lembaga pendidikan dalam menghadapi keterbatasan anggaran pemerintah (Matin & Ahmad, 2020). Pengelolaan yang integratif terhadap berbagai sumber dana ini memerlukan sistem manajemen yang terstandarisasi dan mekanisme pelaporan yang akuntabel (Mesiono & Roslaeni, 2021).

Penelitian tentang manajemen pembiayaan pendidikan terus berkembang, khususnya dalam konteks peningkatan tata kelola keuangan lembaga pendidikan di Indonesia. Kajian-kajian terkini menyoroti pentingnya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan sekolah, termasuk keterlibatan aktif pemangku kepentingan seperti komite sekolah, orang tua, dan masyarakat (Chysara & Nugraha, 2024). Di era digitalisasi, sistem informasi manajemen keuangan

juga mulai diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana pendidikan (Salsabila & Karim, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (Komariyah et al., 2022). Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka seperti buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen ilmiah yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah nasional dan buku akademik yang membahas konsep pembiayaan pendidikan dan manajemen pendidikan (Hidayat & Rusdiana, 2022; Arwildayanto et al., 2017). Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi topik serta kemutakhiran publikasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, identifikasi sumber referensi, serta pengelompokan konsep-konsep utama terkait manajemen pembiayaan pendidikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menemukan pola, konsep, serta prinsip-prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan yang efektif (Zohriah et al., 2023).

Kriteria pemilihan sumber literatur dalam penelitian ini meliputi: (1) relevansi topik dengan manajemen pembiayaan pendidikan, (2) kemutakhiran publikasi dengan mengutamakan sumber yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir, serta (3) kredibilitas sumber yang ditunjukkan melalui publikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi atau penerbit bereputasi (Suryaman & Lestari, 2025). Proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis untuk memastikan keandalan data yang digunakan dalam analisis.

Tahap analisis data dalam penelitian ini mengikuti prosedur yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yakni meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dari berbagai sumber literatur, dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif analitis (Mulyati & Suryaman, 2025). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan menggabungkan temuan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan topik yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses pengelolaan dana pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan penggunaan dana pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan (Hidayat & Rusdiana, 2022). Tujuan utama dari manajemen pembiayaan pendidikan adalah memastikan bahwa sumber daya keuangan dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan (Arwildayanto et al., 2017).

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia (Prolina & Nugraha, 2023). Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara sistematis agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan (Rusmiyati et al., 2024).

Secara konseptual, biaya pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu biaya langsung (direct cost), biaya tidak langsung (indirect cost), dan biaya kesempatan (opportunity cost). Biaya langsung mencakup seluruh pengeluaran yang secara langsung berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan,

seperti biaya pengadaan buku, alat tulis, seragam, dan biaya operasional sekolah. Sementara itu, biaya tidak langsung mencakup pengeluaran yang tidak secara langsung terkait dengan proses belajar mengajar, seperti biaya transportasi dan konsumsi peserta didik (Matin & Ahmad, 2020). Pemahaman terhadap kategorisasi biaya ini penting agar pengelola pendidikan dapat menyusun anggaran secara komprehensif dan tepat sasaran.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, pembiayaan pendidikan tidak semata-mata dipandang sebagai beban pengeluaran, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Konsep pembiayaan berbasis kinerja (*performance-based financing*) semakin banyak diadopsi oleh lembaga pendidikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran (Ginanjar & Purwanto, 2022). Pendekatan ini mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi karena alokasi dana dikaitkan langsung dengan capaian kinerja yang terukur.

Karakteristik khusus pembiayaan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang berjenjang dan beragam, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Setiap jenjang memiliki kebutuhan pembiayaan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, keberagaman satuan pendidikan, mulai dari sekolah negeri, swasta, madrasah, hingga pesantren, turut menambah kompleksitas pengelolaan pembiayaan pendidikan di Indonesia (Nurhamzah et al., 2020; Wahyudin, 2021).

Manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif juga erat kaitannya dengan konsep value for money, yaitu kemampuan lembaga pendidikan untuk memaksimalkan nilai yang diperoleh dari setiap unit anggaran yang digunakan. Prinsip ini mengintegrasikan tiga dimensi utama, yakni ekonomi dalam penggunaan input, efisiensi dalam proses pengelolaan, dan efektivitas dalam pencapaian output pendidikan (Mesiono & Roslaeni, 2021). Penerapan konsep value for money dalam manajemen pembiayaan pendidikan menjadi semakin relevan di tengah terbatasnya sumber daya keuangan yang tersedia bagi lembaga pendidikan (Hidayat & Rusdiana, 2022).

2. Tahapan Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan pendidikan umumnya meliputi beberapa tahapan utama, yaitu:

Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan tahap awal dalam manajemen pembiayaan pendidikan (Hidayat & Rusdiana, 2022). Pada tahap ini, lembaga pendidikan menyusun rencana anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan program pendidikan yang akan dilaksanakan (Sukatin et al., 2023). Perencanaan anggaran yang baik harus mempertimbangkan prioritas program, kebutuhan sarana prasarana, serta pengembangan kompetensi tenaga pendidik (Rusmiyati et al., 2024).

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan salah satu wujud konkret dari tahapan perencanaan anggaran di tingkat satuan pendidikan. RKAS disusun berdasarkan analisis kebutuhan sekolah yang komprehensif, mencakup identifikasi kebutuhan sarana prasarana, program pengembangan guru, kegiatan kesiswaan, serta kebutuhan operasional rutin. Proses penyusunan RKAS yang partisipatif, yaitu melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan orang tua peserta didik, terbukti menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan (Habibatulloh et al., 2022; Sukatin et al., 2023).

Dalam proses perencanaan anggaran, lembaga pendidikan perlu mempertimbangkan siklus anggaran tahunan yang selaras dengan kalender akademik. Perencanaan yang tidak mempertimbangkan siklus ini dapat

mengakibatkan ketidakselarasan antara kebutuhan kegiatan akademik dengan ketersediaan dana, sehingga menghambat pelaksanaan program pendidikan secara optimal (Ilham & Asriati, 2024). Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pengelola keuangan dan pimpinan akademik menjadi kunci keberhasilan tahap perencanaan anggaran pendidikan.

Pelaksanaan Penggunaan Dana

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan penggunaan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun (Arwildayanto et al., 2017). Penggunaan dana pendidikan harus dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat mendukung pelaksanaan program pendidikan secara optimal (Komariyah et al., 2022). Dana pendidikan biasanya digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pembayaran gaji tenaga pendidik, pengadaan fasilitas pendidikan, pengembangan kurikulum, serta kegiatan pembelajaran (Fiandi & Junaidi, 2023; Suherman et al., 2025).

Pada tahap pelaksanaan penggunaan dana, mekanisme pencairan dan pelaporan keuangan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap transaksi keuangan wajib didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, seperti kuitansi, faktur, atau surat pertanggungjawaban, sebagai bagian dari sistem pengendalian internal yang efektif (Norsiva, 2024). Penerapan sistem pencatatan yang tertib dan terstandarisasi tidak hanya memudahkan proses pelaporan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan audit keuangan pendidikan.

Tantangan utama dalam tahap pelaksanaan penggunaan dana pendidikan adalah memastikan kesesuaian antara realisasi pengeluaran dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Berbagai faktor dapat menyebabkan deviasi antara rencana dan realisasi, seperti perubahan harga barang dan jasa, kebutuhan mendadak yang tidak terantisipasi dalam perencanaan, serta keterlambatan pencairan dana dari pemerintah (Handayani & Huda, 2020). Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, lembaga pendidikan perlu menyiapkan mekanisme revisi anggaran yang fleksibel namun tetap akuntabel.

Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan merupakan bagian penting dalam manajemen pembiayaan pendidikan (Mesiono & Haidir, 2020). Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana pendidikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Hidayat & Rusdiana, 2022). Evaluasi juga perlu dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas penggunaan dana pendidikan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan (Prolina & Nugraha, 2023; Rusmiyati et al., 2024).

Mekanisme pengawasan dalam manajemen pembiayaan pendidikan dapat dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pimpinan lembaga pendidikan beserta tim internal, meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi kesesuaian realisasi dengan rencana, serta pemantauan rutin terhadap perkembangan penggunaan anggaran (Lestari et al., 2023). Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh inspektorat daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta komite sekolah sebagai representasi masyarakat.

Hasil evaluasi penggunaan dana pendidikan hendaknya dijadikan bahan masukan yang konstruktif bagi perencanaan anggaran periode berikutnya dalam siklus manajemen yang berkelanjutan. Pendekatan siklus PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) dapat diadaptasi dalam manajemen pembiayaan pendidikan untuk memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan (Mulyati & Suryaman, 2025). Dengan

menerapkan pendekatan siklus ini, lembaga pendidikan dapat secara progresif meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan dari satu periode ke periode berikutnya (Suryaman & Lestari, 2025).

3. Prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang efektif harus didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.
2. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pihak yang berkepentingan.
3. Efisiensi, yaitu penggunaan dana secara hemat namun tetap mencapai tujuan yang diharapkan.
4. Efektivitas, yaitu penggunaan dana yang mampu menghasilkan hasil pendidikan yang optimal.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan serta mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Zohriah et al., 2023; Komariyah et al., 2022).

Penerapan prinsip transparansi dalam manajemen pembiayaan pendidikan diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan secara terbuka, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pelaporan penggunaan dana secara berkala kepada komite sekolah dan orang tua peserta didik (Habibatulloh et al., 2022). Transparansi yang baik terbukti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pendidikan mencakup pertanggungjawaban moral, administratif, dan hukum atas penggunaan seluruh sumber dana pendidikan. Implementasi akuntabilitas memerlukan sistem pencatatan yang tertib, mekanisme audit internal dan eksternal, serta penegakan sanksi terhadap penyimpangan penggunaan dana (Ilham & Asriati, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan akuntabilitas secara konsisten memiliki tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang lebih tinggi dan kinerja pendidikan yang lebih baik (Lestari et al., 2023; Norsiva, 2024).

4. Strategi Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan yang Efektif

Strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan yang efektif mencakup beberapa aspek, di antaranya diversifikasi sumber pendanaan, penerapan sistem perencanaan berbasis data, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan. Diversifikasi sumber pendanaan menjadi penting agar lembaga pendidikan tidak hanya bergantung pada satu sumber dana, tetapi mampu menggali berbagai potensi pendapatan yang sah dan berkelanjutan (Matin & Ahmad, 2020). Strategi ini terbukti meningkatkan ketahanan finansial lembaga pendidikan, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.

Penerapan sistem perencanaan berbasis data (*data-driven budgeting*) merupakan salah satu praktik terbaik dalam manajemen pembiayaan pendidikan modern. Melalui pendekatan ini, alokasi anggaran dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang terukur, prioritas program pendidikan, serta hasil evaluasi penggunaan dana pada periode sebelumnya (Milah et al., 2024). Pendekatan berbasis data memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang terbatas secara lebih tepat sasaran (Suryaman & Lestari, 2025).

Di era digitalisasi, penerapan teknologi informasi dalam manajemen pembiayaan pendidikan semakin diperlukan. Sistem informasi keuangan berbasis digital mampu mempercepat proses pelaporan, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta memudahkan akses informasi bagi seluruh pemangku kepentingan (Salsabila

& Karim, 2025). Penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan pendidikan seperti ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang dikembangkan pemerintah merupakan salah satu contoh konkret digitalisasi manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia (Wahyudin, 2021).

5. Peran Pemangku Kepentingan dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Keberhasilan manajemen pembiayaan pendidikan tidak terlepas dari peran aktif berbagai pemangku kepentingan. Kepala sekolah sebagai manajer pendidikan memiliki tanggung jawab utama dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penggunaan dana pendidikan (Ginanjar & Purwanto, 2022). Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam bidang keuangan menjadi faktor determinan dalam efektivitas pengelolaan pembiayaan pendidikan, sehingga pengembangan kapasitas kepala sekolah di bidang ini perlu mendapat perhatian serius (Handayani & Huda, 2020).

Komite sekolah dan orang tua peserta didik juga memiliki peran strategis sebagai pengawas eksternal dan pendukung pembiayaan pendidikan. Keterlibatan komite sekolah dalam proses penyusunan dan pengesahan anggaran merupakan mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana (Habibatulloh et al., 2022). Selain itu, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam penggalian sumber dana alternatif dapat memperluas basis pembiayaan pendidikan secara signifikan (Nurhamzah et al., 2020; Mesiono & Roslaeni, 2021).

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, berperan sebagai regulator dan penyedia dana utama dalam sistem pembiayaan pendidikan Indonesia. Regulasi yang jelas dan kebijakan alokasi anggaran yang berpihak pada pendidikan berkualitas menjadi landasan bagi terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan (Norsiva, 2024). Sinergi antara pemerintah, sekolah, komite sekolah, dan masyarakat dalam sistem pembiayaan pendidikan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional secara berkelanjutan (Lestari et al., 2023; Chysara & Nugraha, 2024).

KESIMPULAN

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan komponen strategis dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan yang efektif mencakup empat tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu perencanaan anggaran berbasis data, pelaksanaan penggunaan dana yang tertib, pengawasan berkelanjutan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan dana. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi menjadi landasan fundamental dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang baik.

Selain itu, kajian ini mengidentifikasi bahwa strategi pengelolaan pembiayaan yang efektif mencakup diversifikasi sumber pendanaan, penerapan teknologi informasi dalam sistem keuangan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen keuangan. Peran pemangku kepentingan, khususnya kepala sekolah, komite sekolah, dan masyarakat, sangat determinan dalam keberhasilan implementasi manajemen pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Penelitian-penelitian terkini juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan.

Implikasi dari kajian ini merekomendasikan agar lembaga pendidikan secara konsisten meningkatkan kapasitas pengelola keuangan, menerapkan sistem pelaporan yang transparan dan berbasis teknologi, serta memperkuat

mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam model pembiayaan pendidikan yang paling efektif dalam konteks lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mengingat karakteristik khusus dan tantangan unik yang dihadapi oleh lembaga-lembaga tersebut.

REFERENSI

Arwildayanto, Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Chysara, D. I., & Nugraha, M. S. (2024). Efektivitas pengelolaan keuangan melalui penerapan good governance pada pondok pesantren. *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(1), 166–183. https://doi.org/10.70287/epistemic.v3i1.220

Fiandi, A., & Junaidi, J. (2023). Sumber-sumber dana pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 6(6), 10414–10421. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i6.4391

Ginanjar, M. H., & Purwanto, E. (2022). Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di SMK Informatika Bina Generasi 3 Kabupaten Bogor. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(01), 67–84. https://doi.org/10.30868/im.v5i01.2024

Habibatulloh, K. N., Widodo, S., & Murni, T. (2022). Studi tentang akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan sekolah dan kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri Kabupaten Kaur. *The Manager Review*, 4(1), 129–154.

Handayani, N. F., & Huda, N. (2020). Manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri pascadesentralisasi pendidikan. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 3(4), 332–341.

Hidayat, A., & Rusdiana. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Prinsip Tata Kelola Biaya Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Ilham, & Asriati, N. (2024). Analisis strategi pengelolaan pembiayaan dalam anggaran dana pendidikan di SMK Negeri 1 Tekarang. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 1112–1118.

Komariyah, S., Nurhidayah, N., Andriyana, N., & Murtafi'ah, N. H. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. *Al Wildan: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.

Lestari, K. M., Iswantir, M., Gusli, R. A., & Akhyar, M. (2023). Konsep manajemen keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 3 Bukittinggi. *Idarah Tarbawiyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 1–16.

Matin, & Ahmad, M. (2020). *Buku Ajar Pembiayaan Pendidikan*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Mesiono, & Haidir. (2020). Manajemen pembiayaan pendidikan: Analisis konsep dan implikasinya terhadap peningkatan mutu pendidikan. *Hikmah*.

Mesiono, M., & Roslaeni, R. (2021). Model-model pembiayaan pendidikan (analisis efektivitas dan efisiensi dalam institusi pendidikan). *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2(1), 1–18. https://doi.org/10.51672/jbpi.v2i1.10

Milah, A. R., Hasanah, U., & Nurhidayat, R. (2024). Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di SMK Negeri 1 Cijulang dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Pelita Pendidikan*, 12(2), 45–58.

Mulyati, I., & Suryaman, M. (2025). Integrasi manajemen pembiayaan dan fasilitas pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah: Tinjauan dan sintesis literatur. *Jurnal Tahsinia*, 6(4), 410–425.

Norsiva, S. (2024). Penerapan sistem pengelolaan keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel di Indonesia. *Jurnal Riset dan Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 65–74.

Nurhamzah, Ahmad, E. Q. N., Syah, M., & Suryadi. (2020). Model konseptual manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu di pesantren modern. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 131–152. https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1629

Prolina, N. I., & Nugraha, M. S. (2023). Manajemen pembiayaan pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di madrasah. *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*.

Rusmiyati, S., Miyono, N., & Sumarno. (2024). Manajemen pembiayaan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu akademik. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.

Salsabila, A., & Karim, H. A. (2025). Manajemen pembiayaan pendidikan Islam di era digitalisasi dan tantangan ekonomi modern. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(2), 36–48. https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.3939

Suherman, M., Helmawati, H., Susanti, S., & Amanu, A. F. (2025). Dampak manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.

Sukatin, S., Ariyanto, M., Agnesia, T., Warahmah, M., Sartika, D. D., & Awana, M. (2023). Manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 3(2). https://doi.org/10.57251/ped.v3i2.1374

Suryaman, M., & Lestari, D. A. (2025). Analisis komparatif pengelolaan pembiayaan pendidikan dari berbagai model manajerial di sekolah. *Jurnal Tahsinia*, 6(3), 378–390.

Wahyudin, U. R. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas*. Sleman: Deepublish.

Zohriah, A., Bachtiar, M., & Fatmariyanti, Y. (2023). Manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan: Konsep, landasan hukum, dan model. *Jurnal Indopedia*.